



P E N E T A P A N

Nomor 40/Pdt.P/2020/PA.Pwl

الرحمن الرحيم الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Syamsul bin Muh. Saleh, umur 68 tahun, NIK 7604060704510002, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun Tonyaman, Desa Tonyaman, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, disebut Pemohon I;

Dewi binti Ismail, umur 54 tahun, NIK 7604067112650332, agama Islam, Pendidikan SD Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Dusun Tonyaman, Desa Tonyaman, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami serta walinya;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 17 Januari 2020 yang telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin, yang telah didaftar di Kepaniteraan

Hal.1 dari 20 hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2020/PA.Pwl



Pengadilan Agama Polewali dengan register perkara nomor 40/Pdt.P/2020/PA.Pwl, tanggal 17 Januari 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan pernikahan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, tetapi berdasarkan surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar Nomor B-027/KUA.31.03.06/PW.01/1/2020 tertanggal 15 Januari 2020 menolak untuk mencatatkan pernikahan antara Lisna binti Syamsul dengan Darmawan bin Appe, dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Lisna binti Syamsul, umur 18 tahun agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Dusun Tonyaman, Desa Tonyaman, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar dengan seorang lelaki bernama Darmawan bin Appe umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat Kediaman di Dusun Lemo Baru, Desa Kuajang, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut tetap dilangsungkan karena keduanya telah saling kenal mengenal selama 10 bulan dan sudah sering keluar bersama tanpa sepengetahuan Pemohon I dan Pemohon II bahkan anak Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan layaknya suami istri;

Hal. 2 dari 20 hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2020/PA.Pwl



4. Bahwa antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut, tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan semasa kecil serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tidak pernah menikah dan sudah siap menjadi seorang istri/ibu rumah tangga, begitupun dengan calon suaminya telah akil balig serta sudah siap pula menjadi suami atau kepala rumah tangga dalam keluarga;
6. Bahwa keluarga calon suami telah melamar ke keluarga calon isteri dan Pemohon I dan Pemohon II telah merestui dan menerima rencana pernikahan tersebut, namun Imam/Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang tidak bersedia menikahkan karena usia anak kandung Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Polewali c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
 2. Memberi dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Lisna binti Syamsul dengan calon suaminya bernama Darmawan bin Appe;
 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.
- Apabila bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, oleh Hakim telah memberikan nasihat tentang resiko perkawinan yang dilangsungkan di bawah umur terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan anak Pemohon I dan Pemohon II, keberlanjutan anak Pemohon I dan Pemohon II dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ

Hal. 3 dari 20 hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2020/PA.Pwl



reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologi bagi anak Pemohon I dan Pemohon II serta potensi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang oleh Pemohon I dan Pemohon II diajukan perbaikan terhadap petitum angka 2 sebagaimana dalam berita acara sidang, namun selainnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Lisna binti Syamsul, calon suami bernama Darmawan bin Appe, serta orang tua calon suami bernama Appe bin M. Yamin dan Maryam bin Ismail, kesemuanya telah memberikan keterangan di muka sidang, yang pada pokoknya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, NIK 7604060704510001 bertanggal 24 Mei 2012, aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, NIK 7604067112650332 bertanggal 24 Mei 2012, aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu keluarga Pemohon I dan Pemohon II, Nomor 6474CL2806200800201, tanggal 30 Juni 2008, aslinya dikeluarkan

Hal. 4 dari 20 hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2020/PA.Pwl



oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II, Nomor 6474CLT2806200800201, bertanggal 30 Juni 2008, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Sosial dan Keluarga Berencana, Kabupaten Polewali Mandar, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami, NIK 7604061001940004 bertanggal 1 Januari 2014, aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.6;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP), anak Pemohon I dan Pemohon II, Nomor 056/Mts.31.0261/PP.011/05/2018, tanggal 28 Mei 2018, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Madrasan Tsanawiyah Negeri Banggae, Majene, yang telah diberi meterai cukup kemudian diberi tanda, bukti P.7;
7. Asli Surat Penolakan Pernikahan, Nomor B-027/KUA.31.03.06/PW/01/1/2020. tertanggal 15 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, yang telah diberi meterai cukup, kemudian diberi tanda, bukti P.8;

B. Saksi:

1. Suarni binti Samsul, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Welang Pelang, Desa Tonyaman, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon I dan

Hal. 5 dari 20 hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2020/PA.Pwl



Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal Pemohon I bernama Syamsul bin Muh. Saleh dan Pemohon II bernama Dewi binti Ismail;
- bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Polewali karena Kepala Kantor Urusan Agama Wnomulyo, Kabupaten Polewali Mandar menolak mendaftarkan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa penyebab Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang, menolak mencatatkan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II baru berumur 18 (delapan belas) tahun lebih;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Lisna binti Syamsul) sudah berhenti sekolah di kelas II Sekolah Menengah Atas sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
- bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Darmawan bin Appe;
- bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah melamar anak Pemohon I dan Pemohon II dan lamarannya telah diterima baik oleh Pemohon I dan Pemohon II beserta keluarga Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendesak menikahkan anaknya sementara usia pernikahannya belum cukup 19 tahun, karena antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sangat dekat karena sudah saling kenal (pacaran) selama 2 (dua) bulan yang lalu, sehingga Pemohon I dan

Hal. 6 dari 20 hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2020/PA.Pwl



Pemohon II khawatir anak Pemohon I dan Pemohon II melakukan hal-hal yang dilarang oleh norma agama;

- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah kenal selama 10 bulan dan sering keluar bersama tanpa sepengetahuan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Lisna binti Syamsul) tidak mempunyai hubungan keluarga/darah dan tidak pernah sesusuan dengan calon suaminya semasa kecil;
- bahwa pekerjaan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sebagai buruh bangunan dan nelayan;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Lisna binti Syamsul) belum pernah dilamar oleh laki-laki lain;

2. Sappe binti Ahmad, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Welang Pelang, Desa Tonyaman, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Pemohon I bernama Syamsul bin Muh. Saleh dan Pemohon II bernama Dewi binti Ismail;
- bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Polewali karena Kepala Kantor Urusan Agama Binuang, Kabupaten Polewali Mandar menolak mendaftarkan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa penyebab Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang, menolak mencatatkan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II baru berumur 18 (delapan belas) tahun lebih;

Hal. 7 dari 20 hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2020/PA.Pwl



- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Lisna binti Syamsul) sudah di kelas II Sekolah Menengah Atas sejak dua bulan yang lalu;
- bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Darmawan bin Appe;
- bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah melamar anak Pemohon I dan Pemohon II dan lamarannya telah diterima baik oleh Pemohon I dan Pemohon II beserta keluarga Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendesak menikahkan anaknya sementara usia pernikahannya belum cukup 19 tahun, karena antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sangat dekat karena sudah saling kenal (pacaran) selama 2 (dua) bulan, sehingga Pemohon I dan Pemohon II khawatir anak Pemohon I dan Pemohon II melakukan hal-hal yang dilarang oleh norma agama;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah saling kenal selama 10 (sepuluh) bulan dan sering keluar bersama tanpa sepengetahuan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Lisna binti Syamsul) tidak mempunyai hubungan keluarga/darah dan tidak pernah sesusuan dengan calon suaminya semasa kecil;
- bahwa pekerjaan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sebagai buruh bangunan dan nelayan;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Lisna binti Syamsul) belum pernah dilamar oleh laki-laki lain;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan bahwa tidak akan mengajukan lagi sesuatu dan memohon penetapan;

Hal. 8 dari 20 hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2020/PA.Pwl



Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah Dispensasi Kawin yang termasuk dalam jenis perkara sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a dan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Pengadilan Agama Polewali memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Lisna binti Syamsul dengan dalil-dalil, bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali, menolak mencatatkan perkawinannya karena anak Pemohon I dan Pemohon II, Lisna binti Syamsul baru berumur 18 (delapan belas) tahun, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengawinkan dengan laki-laki bernama Darmawan bin Appe karena keduanya telah saling kenal selama 10 (sepulu) bulan dan sering keluar bersama, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir jika tidak dikawinkan, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan anak Pemohon I dan Pemohon II Lisna binti Syamsul telah siap menjadi ibu rumah tangga serta calon suaminya telah aqil baligh, serta telah melamar Lisna binti Syamsul;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan Dispensasi Kawin, maka perkara ini merupakan pengecualian dari wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui

Hal. 9 dari 20 hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2020/PA.Pwl



mediasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menetapkan batas umur untuk kawin bagi pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan umur tersebut di atas, dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama dengan alasan sangat mendesak;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung R.I (Perma) Nomor 5 Tahun 2019, Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua dari Lisna binti Syamsul yang belum mencapai batas umur untuk kawin, maka Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kapasitas dan kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* ;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II, Lisna binti Syamsul telah menyatakan pada pokoknya bahwa dirinya telah mengetahui kehendak Pemohon I dan Pemohon II untuk mengawinkan dirinya dan setuju serta siap untuk membina rumah tangga dengan calon suaminya serta menyatakan tidak dipaksa untuk kawin, karena antara Lisna binti Syamsul dengan Darmawan bin Appe telah saling mengenal selama 10 (sepuluh) bulan;

Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, Darmawan bin Appe telah menyatakan pada pokoknya bahwa dirinya bersedia pula untuk kawin dan tidak dipaksa serta telah melamar Lisna binti Syamsul;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyatakan bahwa akan menikahkan anaknya Lisna binti Syamsul dan tidak bisa ditunda dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II telah dilamar

Hal. 10 dari 20 hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2020/PA.Pwl



oleh calon suaminya (Darmawan bin Appe) dan hubungan keduanya sedemikian eratnya karena telah saling mengenal dan sangat dekat bahkan sering pergi bersama, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir jika tidak segera dikawinkan, maka akan menimbulkan aib bagi Pemohon I dan Pemohon II beserta keluarganya;

Menimbang, bahwa orang tua calon suami pun menyatakan ingin mengawinkan anaknya, Darmawan bin Appe karena telah cukup dewasa dan tidak bisa lagi ditunda meskipun calon istrinya masih di bawah umur, dan orang tua calon suami bersedia membina serta membimbing anaknya jika kelak telah berumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (fotokopi kartu tanda penduduk), merupakan akta otentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut mengenai Identitas Pemohon I dan Pemohon II, menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II terdaftar dalam database kependudukan Kabupaten Polewali Mandar, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut, terbukti Penggugat berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Polewali, oleh karenanya Penggugat dapat diterima untuk berperkara di Pengadilan Agama Polewali;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi kartu keluarga), merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut mengenai hubungan Pemohon I dan Pemohon II dengan Lisna binti Syamsul sebagai anggota keluarga, bukti tersebut menunjukkan bahwa Lisna binti Syamsul termasuk anak Pemohon I dan Pemohon II, sehingga

Hal. 11 dari 20 hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2020/PA.Pwl



bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi kutipan akta kelahiran), merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut mengenai nama dan waktu kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II (Lisna binti Syamsul), bukti tersebut menunjukkan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Lisna binti Syamsul) baru berumur 18 (delapan belas) 1 (satu) bulan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi kartu tanda penduduk), merupakan akta otentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut mengenai Identitas calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, menunjukkan bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II terdaftar dalam database kependudukan Kabupaten Polewali Mandar, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi ijazah Sekolah Menengah Pertama), merupakan akta otentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut mengenai tingkat/jenjang pendidikan anak Pemohon I dan Pemohon II, Lisna binti Syamsul telah dilalui, menunjukkan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II Lisna binti Syamsul telah tamat Sekolah Menengah Pertama (Madrasah Tsanawiah), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (asli surat penolakan pernikahan), merupakan akta di bawah tangan, bermeterai cukup, isi bukti tersebut mengenai penolakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang untuk mengawinkan anak Pemohon I dan Pemohon II Lisna binti

Hal. 12 dari 20 hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2020/PA.Pwl



Syamsul karena tidak memenuhi persyaratan batas minimal umur untuk menikah, bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil, namun perlu didukung oleh bukti lain untuk mencapai batas minimal, sehingga bukti tersebut serta mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II mengenai tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Polewali karena Kepala Kantor Urusan Agama Binuang, Kabupaten Polewali Mandar menolak mendaftarkan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II disebabkan anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan, anak Pemohon I dan Pemohon II baru berumur 18 tahun, namun mendesak untuk dikawinkan karena antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah kenal selama 10 bulan dan sering keluar bersama tanpa sepengetahuan Pemohon I dan Pemohon, anak Pemohon I dan Pemohon II (Lisna binti Syamsul) tidak mempunyai hubungan keluarga/darah dan tidak pernah sesusuan dengan calon suaminya semasa kecil, pekerjaan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sebagai buruh bangunan dan nelayan, anak Pemohon I dan Pemohon II (Lisna binti Syamsul) belum pernah dilamar oleh laki-laki lain, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, sehingga keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 13 dari 20 hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2020/PA.Pwl



Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II mengenai tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Polewali karena Kepala Kantor Urusan Agama Binuang, Kabupaten Polewali Mandar menolak mendaftarkan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II disebabkan anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan, anak Pemohon I dan Pemohon II baru berumur 18 tahun, namun mendesak untuk dikawinkan karena antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah kenal selama 10 bulan dan sering keluar bersama tanpa sepengetahuan Pemohon I dan Pemohon, anak Pemohon I dan Pemohon II (Lisna binti Syamsul) tidak mempunyai hubungan keluarga/darah dan tidak pernah sesusuan dengan calon suaminya semasa kecil, pekerjaan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sebagai buruh bangunan dan nelayan, anak Pemohon I dan Pemohon II (Lisna binti Syamsul) belum pernah dilamar oleh laki-laki lain, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, sehingga keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 14 dari 20 hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2020/PA.Pwl



1. Bahwa Lisna binti Syamsul adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin mengawinkan anaknya yang bernama Lisna binti Syamsul, namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, selaku Pegawai Pencatat Nikah, karena belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
3. Bahwa umur anak Pemohon I dan Pemohon II (Lisna binti Syamsul) baru 18 (delapan belas) tahun 1 (satu) bulan;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Lisna binti Syamsul) telah berhenti sekolah setelah kelas II pada Sekolah Menengah Atas dua bulan yang lalu;
5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Lisna binti Syamsul) dengan Darmawan bin Appe telah saling mengenal selama 10 (sepuluh) bulan dan sangat dekat karena telah berpacaran selama 2 (dua) bulan dan telah dilamar oleh Darmawan bin Appe;
6. Bahwa Lisna binti Syamsul dengan Darmawan bin Appe tidak mempunyai halangan/larangan untuk kawin baik menurut Undang-Undang maupun hukum syar'i kecuali umurnya tidak mencapai 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan Lisna binti Syamsul mempunyai hubungan sebagai ayah/ibu dan anak, sehingga Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin atas diri Lisna binti Syamsul;
2. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Lisna binti Syamsul) tidak mempunyai halangan untuk kawin, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan

Hal. 15 dari 20 hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2020/PA.Pwl



perundang-undangan yang berlaku tentang perkawinan, kecuali umurnya belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;

3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Lisna binti Syamsul) telah berhenti sekolah sejak duduk di bangkuan kelas II Sekolah Menengah Atas dua bulan yang lalu, dan telah dilamar oleh Darmawan bin Appe;

4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Lisna binti Syamsul) setuju untuk dikawinkan dan telah siap untuk membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, ternyata Lisna binti Syamsul adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II, yang akan dikawinkan dengan laki-laki Darmawan bin Appe, namun belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, sehingga memerlukan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menegaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dan jika pria maupun wanita tidak mencapai umur sebagaimana tersebut di atas, maka Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang tersebut memberikan solusi bahwa untuk dapat dikawinkan, maka dimintakan dispensasi kepada Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa ternyata anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Lisna binti Syamsul baru berumur 18 (delapan belas) tahun 1 (satu) bulan, sehingga terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut harus dimintakan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Polewali ;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa ketentuan batas minimal

Hal. 16 dari 20 hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2020/PA.Pwl



umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur pria yaitu 19 (sembilan belas) tahun, batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas serta diharapkan dengan kenaikan batas minimal umur wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran lebih rendah dan menurunkan resiko kematian bagi ibu dan anak serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa meskipun pada kenyataannya anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Lisna binti Syamsul belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, batas umur minimal untuk menikah bagi seorang wanita, namun anak tersebut telah berhenti sekolah setelah duduk di bangku kelas II Sekolah Menengah Atas dua bulan yang lalu, selain itu Lisna binti Syamsul telah saling kenal dan sangat dekat dengan Darmawan bin Appe, sehingga secara psikologis hubungan keduanya telah sedemikian eratnya sehingga sulit untuk tidak dikawinkan, apalagi Lisna binti Syamsul telah dilamar oleh Darmawan bin Appe dan lamarannya telah diterima baik oleh Pemohon I dan Pemohon II beserta keluarganya;

Menimbang, bahwa perkembangan fisik/jasmaninya Lisna binti Syamsul menampakkan kedewasaan, apalagi Lisna binti Syamsul mengaku telah mensturasi, oleh karenanya secara biologis organ reproduksi anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah siap menerima perubahan, sehingga anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah bertekad untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang sangat dicintainya;

Menimbang, bahwa adapun mengenai selisih umur antara anak Pemohon I dan Pemohon II, Lisna binti Syamsul dengan calon suaminya yang terpaut 8 (delapan) tahun, menurut pendapat Hakim tidak menjadi

Hal. 17 dari 20 hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2020/PA.Pwl



halangan, bahkan menjadikan pasangan serasi, mengingat usia reproduksi wanita terbatas/pendek dibanding dengan reproduksi laki-laki;

Menimbang, bahwa selain itu rencana perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah atas persetujuan dan kerelaan anak Pemohon I dan Pemohon II sendiri, tanpa ada paksaan, karena anak Pemohon I dan Pemohon II, Lisna binti Syamsul dengan Darmawan bin Appe sudah menjalin hubungan cinta, sehingga oleh Pemohon I dan Pemohon II dan keluarganya dikhawatirkan akan timbul hal-hal yang tidak diinginkan yang akan menjadi aib bagi keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan keluarganya jika keduanya tidak segera dikawinkan karena hubungannya sangat dekat;

Menimbang, bahwa rencana perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut ternyata tidak melanggar prinsip-prinsip perkawinan, baik menurut hukum perkawinan Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan nasional, kecuali umurnya belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II dan anaknya (Lisna binti Syamsul) telah bertekad bulat untuk melangsungkan perkawinan, maka Hakim berpendapat bahwa jika menunda-nunda perkawinan tersebut hingga anak Pemohon I dan Pemohon II berumur 19 (sembilan belas) tahun, padahal Lisna binti Syamsul telah saling kenal dan sangat dekat dengan calon suaminya, sehingga jika tidak segera dikawinkan, maka dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat menimbulkan aib bagi kedua belah pihak dan keluarganya yang merupakan mudharat bagi anak Pemohon I dan Pemohon II dan keluarga Pemohon I dan Pemohon II. Hal tersebut jelas bertentangan dengan kaidah fikhi yang lafaznya sebagai berikut :

**درء المفسد مقدم علي
جلب المصلح**

Hal. 18 dari 20 hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2020/PA.Pwl



Artinya: Meninggalkan kemudharatan harus didahulukan dari pada mencari kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II **patut dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka petitum angka 2 permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka Pengadilan Agama Polewali memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Lisna binti Syamsul untuk menikah dengan laki-laki bernama Darmawan bin Appe;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Mengingat semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Lisna binti Syamsul untuk menikah dengan laki-laki bernama Darmawan bin Appe;
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim tunggal pada hari Selasa, tanggal 28 Januari 2020 Miladiah bertepatan tanggal 3 Jumadilakhir 1441 Hijriah, yang diucapkan pada hari itu juga dalam

Hal. 19 dari 20 hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2020/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum oleh **Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, dibantu oleh **Sarinah S., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.

Panitera Pengganti,

Sarinah S., S.H

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp50.000,00
3. Panggilan	: Rp320.000,00
4. PNBP panggilan pertama	: Rp20.000,00
5. Redaksi	: Rp10.000,00
6. Meterai	: Rp6.000,00
Jumlah	: Rp436.000,00.

(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Hal. 20 dari 20 hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2020/PA.Pwl